

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, POLITIK DINASTI, DAN JUMLAH
PELANGGARAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
VARIABEL KINERJA SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2013-
2015)**

Gisti Fairuz Trisha
gistifairuz@gmail.com

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta

Dosen Pembimbing
Ilham Maulana Saud, S.E., M.Sc., Ak., CA

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of fiscal decentralization, dynastic political, and total violation of internal control system on accountability of financial reporting of district/city governments moderated by performance variable. This study used secondary data obtained through the website of BPK RI, the Ministry of Finance, and the Ministry of Home Affairs. The sample in this study was selected based on the purposive sampling method, so as many as 190 samples were obtained, with details of 95 main samples namely district / city governments that were indicated dynastic politics in Indonesia in 2013-2015 and 95 comparative samples namely district /city governments that were not politically indicated dynasty in Indonesia in 2013-2015. Testing the hypothesis in this study using multiple linear regression with MRA (Moderated Regression Analysis), so there are 2 models in the study. The data collected was analyzed first by testing the classical assumptions, then testing the hypothesis was carried out with the SPSS 15.0 test tool. Based on the results of the study it can be concluded that partially the dependent variable on the central government, dynastic politics, and the number of violations of the internal control system has a significant negative effect on the accountability of local government financial reporting, while the variables of regional independence and financial effectiveness do not affect the financial reporting accountability of local governments. Furthermore, the performance variable is able to moderate the effect of dependence on the central government on the accountability of local government financial reporting, but is unable to moderate the influence of regional independence and dynastic politics on the accountability of local government financial reporting.

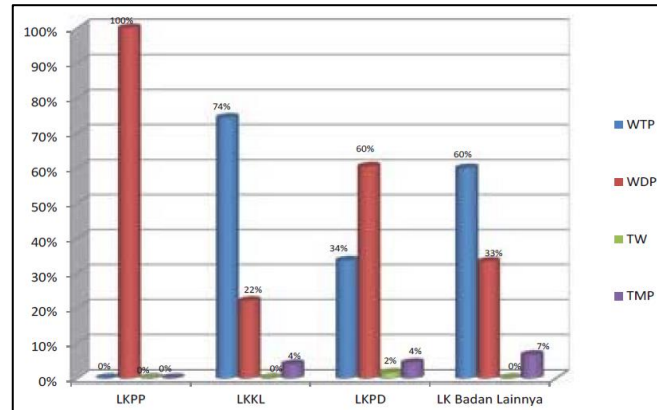
Keywords: *Fiscal Decentralization, Regional Independence, Dependence on Central Government, Financial Effectiveness, Dynasty Politics, Number of Violations in Internal Control Systems, Performance, Accountability of Regional Government Financial Reporting.*

PENDAHULUAN

Sistem desentralisasi di Indonesia mulai diberlakukan pada tahun 2001 setelah dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang telah disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Desentralisasi merupakan suatu proses pelimpahan kekuasaan politik, fiskal (keuangan), serta pengambilan keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Moisiu, 2013). Dalam era desentralisasi saat ini, akuntabilitas dalam segi kinerja maupun penyajian pelaporan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan daerah merupakan salah satu elemen dari manajemen keuangan daerah yang dibutuhkan dalam rangka mengontrol kebijakan keuangan daerah.

Akuntabilitas keuangan daerah adalah kewajiban dari pemerintah daerah dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan, serta mengungkapkan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan dan penggunaan dana publik kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas diyakini mampu memperbaiki kondisi pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengurangi tingkat korupsi sehingga tercapai tatanan pemerintahan yang demokratis (Erryana dan Setyawan, 2016). Melalui pemerintahan yang akuntabel, pemerintah akan memperoleh dukungan dari publik. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan cerminan keseriusan serta komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Melalui keseriusan serta komitmen tadi, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atas segala sesuatu yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan pemerintah melalui program yang memiliki orientasi publik (Anggraini dan Riharjo, 2017).

Berikut data opini pemeriksaan laporan keuangan tahun 2013 pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester I tahun 2014:



Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014 (bpk.go.id)

Gambar 1.1
Presentase Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2013

Opini audit yang dikeluarkan oleh BPK dapat digunakan sebagai tolak ukur akuntabilitas laporan keuangan (Fontanella dan Rossieta, 2014). Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa opini audit dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013 masih didominasi oleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan persentase sebesar 60%, dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang mempunyai persentase lebih rendah yaitu sebesar 34%, dan sisanya adalah opini Tidak Wajar (TW) sebesar 2% dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) sebesar 4%. Hal serupa juga terjadi pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2013 yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sedangkan untuk Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Badan Lainnya telah didominasi oleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan di kalangan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih tergolong lemah jika dibandingkan dengan Kementerian Negara/Lembaga dan badan lainnya.

Secara umum, desentralisasi fiskal mampu mendorong pemerintah daerah mempunyai akuntabilitas keuangan yang tinggi jika dilihat dari aspek kemandirian daerah serta ketergantungan pada pemerintah pusat (Fontanella dan Rossieta, 2014). Kemandirian daerah

merupakan suatu kondisi dimana daerah mampu secara mandiri membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik kepada masyarakat sebagai pihak yang telah membayar pajak serta retribusi yang menjadi sumber keuangan daerah (Halim dan Kusufi, 2012). Mudhofar dan Tahar (2016) menyatakan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap laporan keuangan. Hal tersebut dapat terjadi karena melalui kemandirian daerah yang tinggi, daerah dapat membiayai belanja daerahnya secara mandiri, sehingga daerah mampu lebih mudah dalam memberikan pertanggungjawaban, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitasnya.

Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah adanya kemampuan keuangan daerah serta rendahnya ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Ketergantungan pada pemerintah pusat yang rendah bertujuan agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi sumber keuangan terbesar, sehingga peranan daerah menjadi lebih besar. Ketergantungan terhadap dana perimbangan seperti dana alokasi umum (DAU) merupakan suatu hambatan bagi pemerintah daerah dalam rangka memperoleh dan mengintensifkan pendapatan daerahnya (Brodjonegoro, 2002). Fontanella dan Rossieta (2014) menunjukkan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Efektivitas keuangan didefinisikan sebagai sejauhmana kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan serta memaksimalkan potensi pendapatan yang dibutuhkan dalam memobilisasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan (Mudhofar dan Tahar, 2016). Dalam penelitian ini, efektivitas keuangan yang dimaksud adalah sejauhmana kemampuan pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang telah dianggarkan sebelumnya. . Penelitian yang dilakukan oleh Mudhofar dan Tahar (2016) diperoleh hasil yaitu efektivitas tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dalam penelitian Erryana dan Setyawan (2016)

diperoleh hasil yaitu terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari efektivitas daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah se- Jawa Tengah.

Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi memunculkan risiko adanya kontrol penuh oleh elit daerah. Dalam beberapa kajian ekonomi politik, dinyatakan bahwa para elit memiliki kecenderungan untuk mempertahankan serta memperoleh kembali kekuasaannya dalam jangka waktu yang lama melalui salah satunya adalah politik dinasti (Querrubin, 2010). Di banyak daerah di Indonesia, para elit daerah membangun dinasti politik melalui pemilihan umum kepala daerah (Halim, 2014). Dimana, para pelaku politik dinasti akan menduduki jabatan publik yang sama yang diperoleh dari anggota keluarga mereka yang menduduki jabatan sebelumnya (Asako *et al.*, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Nuritomo dan Rossieta (2014) mengungkapkan bahwa politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini searah dengan penelitian yang dilakukan Anggraini dan Riharjo (2017).

Dalam proses penyusunan laporan keuangan, pemerintah memerlukan suatu sistem pengendalian internal. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian yang dilakukan Purbasari dan Bawono (2017) diperoleh hasil bahwa jumlah temuan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Rasmini dan Masdiantini (2018)

Mahsun (2006) mendefinisikan kinerja (*performance*) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian, pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam rangka mencapai

sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah (Nuritomo dan Rossieta, 2014).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Mudhofar dan Tahar (2016) dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penambahan dua variabel independen, yaitu politik dinasti dan jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal. Penambahan variabel politik dinasti dan jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal dalam penelitian ini dilakukan atas saran dari peneliti terdahulu dan juga melihat fenomena yang terjadi pada tahun 2013-2015. Dimana, pada tahun 2013, isu mengenai politik dinasti ramai diperbincangkan setelah adanya penangkapan terhadap Tubagus Chaeri Wardhana yang merupakan adik ipar dari Gubernur Banten (Ratu Atut Chosiyah) dan suami Walikota Tangerang Selatan (Airin Rachmi Diany) atas dugaan suap ke Mahkamah Konstitusi terkait kasus pilkada Lebak, Banten. Dari penangkapan tersebut, terungkaplah jaringan politik dinasti dari keluarga Ratu Atut Chosiyah.

Selanjutnya, berdasarkan data jumlah kelemahan SPI yang terdapat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI, pada tahun 2013-2014 terjadi tren kenaikan jumlah kelemahan SPI yang ditemukan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dimana pada tahun 2013 terjadi 6.943 kasus kelemahan SPI oleh pemerintah daerah, dan pada 2014 mengalami kenaikan menjadi 7.642 kasus kelemahan SPI. Pada tahun 2015, kasus kelemahan SPI oleh pemerintah daerah mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 7.093 kasus kelemahan SPI.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji efektivitas keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk menguji jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
6. Untuk menguji kinerja pemerintah daerah mampu memoderasi hubungan kemandirian daerah dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
7. Untuk menguji kinerja pemerintah daerah mampu memoderasi hubungan ketergantungan pada pemerintah dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
8. Untuk menguji kinerja pemerintah daerah mampu memoderasi hubungan politik dinasti dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* merupakan teori yang memberikan gambaran situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih pada sasaran hasil utama mereka yaitu kepentingan organisasi (Raharjo, 2007). Aspek psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dalam teori ini adalah para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principle*, selain itu *steward* cenderung tidak akan meninggalkan

organisasinya karena *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya tersebut (Riyadi dan Yulianto, 2014).

Teori Pilihan Publik (*Public Choice Theory*)

Teori pilihan publik menyatakan bahwa pejabat terpilih serta birokrat pemerintah yang mengaku mengutamakan kepentingan umum dalam proses pemungutan suara, justru seringkali menggunakan sektor publik untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Untuk mencapai kepentingan pribadi mereka, birokrat akan senantiasa menyusun program dengan penganggaran yang tidak sesuai dan berupaya untuk terus meningkatkan kekuatan serta pengaruh mereka.

METODE PENELITIAN

Objek pada penelitian ini adalah data realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2013-2015 yang tersedia pada *website* Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data terkait politik dinasti dan kor kinerja diperoleh dari Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kemendagri RI, data terkait desentralisasi fiskal diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, dan data opini audit erta jumlah pelanggaran item pengendalian internal diperoleh dari BPK RI. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*.

Variabel independen pada penelitian ini adalah akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Opini audit dalam penelitian ini akan diukur dengan skala ordinal yang menunjukkan tingkatan atau peringkat mulai dari opini paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu 1= Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), 2= Tidak Wajar (TW), 3= Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 4= Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjela (WTP-DPP), dan 5= Wajar Tanpa Penegcualian (WTP). Selanjutnya variabel kemandirian

daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, dan efektivitas keuangan diukur dengan menggunakan rasio yang diperoleh melalui rumus:

$$\text{Kemandirian daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$\text{Ketergantungan pada pemerintah pusat} = \frac{\text{DAU+DAK}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$\text{Efektivitas keuangan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target Penerimaan PAD yang telah ditetapkan}}$$

Variable politik dinasti diukur menggunakan variabel *dummy* seperti dalam penelitian Nuritomo dan Rossieta (2014). Skor “1” untuk daerah yang terindikasi menjalankan politik dinasti pada kepala daerah dan wakil kepala daerah serta “0” untuk daerah yang tidak terindikasi menjalankan praktik politik dinasti. Jumlah pelanggaran SPI diukur dengan menggunakan jumlah kasus kelemahan SPI tiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang terdapat pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah. Ukuran kinerja penyelenggaran pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 95 sampel kasus yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia yang terindikasi menjalankan praktik politik dinasti tahun 2013-2015, dan 95 sampel pembanding yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia yang tidak terindikasi menjalankan praktik politik dinasti tahun 2013-2015. Sehingga total sampel yang terpilih dan diolah adalah 190.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
AK	190	1	5	4,13	0,984
KD	190	0,0173	0,5612	0,127850	0,1028976
KP	190	0,0000	0,8756	0,584208	0,1630497
EK	190	0,4070	33,6868	1,467794	2,4160462
PD	190	0	1	0,50	0,501
SPI	190	2	20	7,83	3,3361
KK	190	0,9628	3,4552	2,823496	0,4782933
Valid N	190				

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Tabel 4.2 menggambarkan deskripsi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Tabel 4.2 di atas menunjukkan terdapat 190 sampel yang digunakan dalam penelitian. Rata-rata akuntabilitas keuangan pemerintah daerah adalah 4,13. Hal ini menunjukkan tingkat perolehan opini audit yang baik karena didominasi oleh opini WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas). Standar deviasi akuntabilitas keuangan pemerintah daerah sebesar 0,984. Dengan 5 sebagai nilai tertinggi dan 1 sebagai nilai terendah.

Rata-rata kemandirian daerah adalah 0,127850 atau sebesar 12% dan standar deviasi 0,1028976. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan jumlah PAD dalam total pendapatan suatu pemerintah daerah masih tergolong kecil sehingga dapat dikatakan bahwa kemandirian daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2013-2015 masih rendah. Daerah yang memiliki kemandirian daerah paling rendah adalah Kota Pagar Alam tahun 2014 dengan rasio kemandirian daerah sebesar 0,0173, dan daerah yang memiliki kemandirian daerah paling tinggi adalah Kota Bima tahun 2014 dengan rasio kemandirian daerah sebesar 0,5612.

Variabel ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki nilai rata-rata 0,584208 atau sebesar 58% dan standar deviasi 0,1630497. Nilai rata-rata 58% menunjukkan jumlah DAU

dan DAK dalam total pendapatan suatu pemerintah daerah tergolong tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat masih tinggi. Daerah yang memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat paling rendah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 dengan rasio ketergantungan pada pemerintah pusat sebesar 0,0000 dan daerah yang memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat paling tinggi adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2013 dengan rasio ketergantungan pada pemerintah pusat sebesar 0,8756.

Variabel efektivitas keuangan memiliki rata-rata 1,467794 atau 146% dan standar deviasi 2,4160462. Rata-rata rasio efektivitas keuangan sebesar 146% menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah tergolong sangat efektif ($> 100\%$). Daerah yang memiliki efektivitas keuangan paling rendah adalah Kota Pagar Alam tahun 2014 dengan rasio efektivitas sebesar 0,4070 dan daerah yang memiliki efektivitas keuangan paling tinggi adalah Kota Bima tahun 2014 dengan rasio efektivitas sebesar 33,6868.

Variabel politik dinasti yang diproksikan dengan variabel *dummy* memiliki nilai minimum 0 untuk daerah yang tidak terindikasi politik dinasti dan nilai maksimum 1 untuk daerah yang terindikasi politik dinasti. Variabel politik dinasti memiliki rata-rata 0,50 dan standar deviasi sebesar 0,501. Variabel jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal memiliki rata-rata 7,83 dan nilai standar deviasi sebesar 3,361. Jumlah temuan pelanggaran sistem pengendalian internal terendah adalah Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pacitan tahun 2013 dengan jumlah 2 temuan dan jumlah temuan pelanggaran sistem pengendalian internal terbesar adalah Kota Manado tahun 2013 dengan jumlah 20 temuan.

Variabel kinerja memiliki rata-rata sebesar 2,823496 dan standar deviasi sebesar 0,4782933. Rata-rata skor kinerja 2,823496 mengindikasikan kinerja pemerintah daerah yang sudah bagus karena masuk dalam kategori tinggi (skor 2–3). Pemerintah daerah yang memiliki skor kinerja terendah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2013

dengan skor kinerja 0,9628 dan pemerintah daerah yang memiliki skor kinerja tertinggi adalah Kabupaten Pinrang tahun 2015 dengan skor kinerja 3,4552.

Uji Normalitas

Tabel 2
Uji Normalitas Persamaan 1 dan Persamaan 2

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i>	Nilai Sig	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,183	Residual berdistribusi normal
<i>Unstandardized Residual</i>	0,318	Residual berdistribusi normal

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Hasil pengujian normalitas pada model persamaan 1 dan 2 menunjukkan hasil sebesar 0,183 dan 0,318. Artinya nilai signifikansi $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Tabel 3
Uji Autokorelasi Persamaan 1 dan Persamaan 2

Model Summary^b		
Durbin-Watson	1,734	Terbebas Autokorelasi
Durbin-Watson	1,617	Terbebas Autokorelasi

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Hasil uji autokorelasi untuk model persamaan 1 dan 2 menunjukkan nilai Durbin-Watson 1,734 dan 1,617. Artinya nilai Durbin-Watson 1,734 dan 1,617 memenuhi syarat persamaan regresi terbebas dari autokorelasi karena berada diantara nilai -2 dan +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model persamaan 1 terbebas dari autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4
Uji Multikolinearitas Persamaan 1

Variabel	Tolerance	VIF
Kemandirian Daerah	0,576	1,736
Ketgantungan pada Pemerintah Pusat	0,616	1,624

Efektivitas Keuangan	0,838	1,193
Politik Dinasti	0,884	1,131
Jumlah Pelanggaran SPI	0,813	1,230
Kinerja	0,869	1,150

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Hasil uji multikolinearitas untuk model persamaan 1 menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi syarat terbebas dari multikolinearitas karena memiliki nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam model persamaan 1 terbebas dari multikolinearitas.

Tabel 5
Uji Multikolinearitas Persamaan 2

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
Kemandirian Daerah	0,019	52,737
Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	0,364	2,750
Efektivitas Keuangan	0,835	1,198
Politik Dinasti	0,028	35,617
Jumlah Pelanggaran SPI	0,797	1,255
KK*KD	0,018	54,429
KK*KP	0,419	2,388
KK*PD	0,028	35,744

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Dalam model persamaan 2, beberapa variabel, seperti kemandirian daerah, politik dinasti, serta variabel interaksi KK*KD dan variabel interaksi KK*PD memiliki nilai VIF > 10 dan nilai *Tolerance* < 0,1 sehingga dinyatakan mengandung multikolinearitas.

Menurut Gujarati dan Porter (2012), terdapat dua pilihan dalam mengatasi masalah multikolinearitas: (1) tidak melakukan apapun/ dibiarkan saja (*do nothing*), dan (2) menggunakan aturan tertentu (*rule of thumb*). Gujarati dan Porter (2012) menyatakan bahwa, menurut paradigma *do nothing*, multikolinearitas merupakan kehendak Tuhan dan bukan suatu permasalahan teknik statistika. Selanjutnya, paradigma *rule of thumb* menyatakan bahwa jika terjadi permasalahan multikolinearitas serius, maka dapat diatasi dengan berbagai cara, seperti apriori informasi, menggabungkan data *cross-section* dan data *time series*,

mengeluarkan salah satu atau lebih variabel independen yang memiliki korelasi tinggi, serta mentransformasikan data dalam bentuk logaritma natural atau *first difference*. Paradigma *do nothing* sejalan dengan argumen Hartman dan Moers (1999) dalam Hartono (2016), yang menyatakan bahwa multikolinearitas tidak terjadi karena koefisien dari interaksi tidak sensitif terhadap perubahan-perubahan dari titik awal skala (misalnya ditransformasikan untuk ditengahkan berdasarkan nilai rata-ratanya), sehingga multikolinearitas tidak menjadi masalah ketika menerapkan analisis regresi moderasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6
Uji Heteroskedastisitas Persamaan 1

Correlations	
Kemandirian Daerah	0,930
Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	0,838
Efektivitas Keuangan	0,352
Politik Dinasti	0,861
Jumlah Pelanggaran SPI	0,606
Kinerja	0,107

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Tabel 7
Uji Heteroskedastisitas Persamaan 2

Correlations	
Kemandirian Daerah	0,696
Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	0,745
Efektivitas Keuangan	0,460
Politik Dinasti	0,675
Jumlah Pelanggaran SPI	0,934
KK*KD	0,703
KK*KP	0,359
KK*PD	0,794

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Tabel berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas setiap variabel dalam masing-masing persamaan yang didasarkan pada nilai signifikansi dengan menggunakan Uji *Spearman's rho*. Dalam uji heteroskedastisitas dengan *Spearman's rho*, suatu variabel dinyatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas ketika nilai signifikansi antara variabel

independen dengan residual $> 0,05$ (Priyatno, 2010). Hasil uji heteroskedastisitas untuk model persamaan 1 dan 2 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi antara variabel independen dengan residual $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan model persamaan 1 dan 2 tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 8
Hasil Uji Simultan (Uji Nilai F) Persamaan 1 dan Persamaan 2

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	53,617	6	8,936	12,642	0,000
Residual	129,351	183	0,707		
Total	182,968	189			
1 Regression	57,647	8	7,206	10,407	0,000
Residual	125,322	181	0,692		
Total	182,968	189			

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Hasil uji F pada model persamaan 1 dan 2 menghasilkan nilai signifikansi yang sama yaitu $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, efektivitas keuangan, politik dinasti, jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal, kemandirian daerah yang dimoderasi oleh kinerja, ketergantungan pada pemerintah pusat yang dimoderasi oleh kinerja, dan politik dinasti yang dimoderasi oleh kinerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*) Persamaan 1 dan Persamaan 2

<i>Model Summary^b</i>	
<i>Adjusted R Square</i>	0,270
<i>Adjusted R Square</i>	0,285

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Hasil uji koefisien determinasi pada model persamaan 1 menghasilkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,270, artinya variabel independen yaitu kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, efektivitas keuangan, politik dinasti, jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal, dan kinerja dapat menjelaskan variabel dependen yaitu akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 27%, sedangkan 73% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model. Hasil uji koefisien determinasi pada model persamaan 2 menghasilkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,285, yang artinya variabel independen kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, efektivitas keuangan, politik dinasti, jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal, kemandirian daerah yang dimoderasi kinerja, ketergantungan pada pemerintah pusat yang dimoderasi kinerja, dan politik dinasti yang dimoderasi kinerja dapat menjelaskan variabel dependen yaitu akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 28,5%. Sedangkan 71,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Uji Parsial (Uji T)

Tabel 10
Hasil Uji Parsial (Uji T) Persamaan 1 dan Persamaan 2

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>	Sig.
	B	
1 (<i>Constant</i>)	4,300	0,000
Kemandirian Daerah	0,577	0,462
Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	-0,961	0,046
Efektivitas Keuangan	0,019	0,491
Politik Dinasti	-0,746	0,000
Jumlah Pelanggaran SPI	-0,045	0,027
Kinerja	0,358	0,010
2 (<i>Constant</i>)	5,293	0,000
Kemandirian Daerah	-3,367	0,432
Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	-2,017	0,001
Efektivitas Keuangan	0,018	0,507
Politik Dinasti	-1,271	0,079
Jumlah Pelanggaran SPI	-0,042	0,040
KK*KD	1,368	0,341
KK*KP	0,314	0,019

KK*PD	0,207	0,412
-------	-------	-------

Sumber: Output SPSS v.15.0.

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel kemandirian daerah menunjukkan nilai sig $0,462 > 0,05$ dan nilai koefisien sebesar $0,577$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (**H₁**) **tidak terdukung**. Kemandirian daerah yang rendah dapat terjadi karena sumber penerimaan strategis lebih banyak dikuasai oleh pusat. Dimana sumber penerimaan strategis seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, serta penerimaan sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas (migas) menjadi sumber penerimaan pendapatan bagi pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota hanya mengelola sumber penerimaan nonstrategis seperti pajak restoran, pajak hotel, dan pajak penerangan jalan. Hal ini menyebabkan sulitnya pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerahnya, sehingga berdampak pada rendahnya kemandirian daerah. Kemandirian daerah yang rendah ini mengakibatkan variabel kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel ketergantungan pada pemerintah pusat menghasilkan nilai sig $0,046 < 0,05$ dan nilai koefisien sebesar $-0,961$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (**H₂**) **terdukung**. Hal ini disebabkan karena dengan adanya jaminan dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah akan bergantung pada dana transfer tersebut dan tidak mengoptimalkan sumber pendanaan yang bisa dihasilkan dari daerahnya. Dana pusat yang besar akan berkorelasi negatif dengan peningkatan PAD. Semakin kecilnya proporsi pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, atau semakin besar PAD suatu daerah, maka hal itu akan berdampak pada kelancaran mobilisasi dari dana penyelenggaraan pemerintah daerah (Ariansyah et al., 2004). Selanjutnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lancar, akan mendukung untuk terciptanya akuntabilitas yang baik (Mudhofar dan Tahar, 2016).

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel efektivitas keuangan menghasilkan nilai sig $0,491 > 0,05$ dan nilai koefisien sebesar 0,19. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (**H₃**) **tidak terdukung**. Hal ini disebabkan karena penggunaan rasio keuangan misalnya saja rasio efektivitas keuangan pada organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah masih belum banyak dilakukan jika dibandingkan dengan organisasi sektor privat (Pramono, 2014). Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan penyajian laporan keuangan pada organisasi pemerintah daerah yang sifat serta cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan organisasi sektor privat. Belum lazimnya penggunaan rasio keuangan dalam organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah ini menyebabkan efektivitas keuangan tidak dijadikan tolak ukur akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel politik dinasti menghasilkan nilai sig $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar -0,746. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (**H₄**) **terdukung**. Keberadaan politik dinasti akan membatasi munculnya calon alternatif bagi rakyat. Terbatasnya calon alternatif bagi rakyat menyebabkan rendahnya kualitas calon kepala daerah. Karena pada prinsipnya, suksesi kepemimpinan dalam praktik politik dinasti tidak berdasarkan pada profesionalitas dan kapabilitas melainkan bertumpu pada hubungan darah (Prianto, 2016). Ketiadaan profesionalitas dan kontrol yang memadai mampu memunculkan penyakit birokrasi seperti penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang pada akhirnya akan berdampak pada semakin berkurangnya akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal menghasilkan nilai sig $0,027 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar $-0,045$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (**H₅**) **terdukung**. Semakin banyak jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal yang dilakukan, maka akan semakin rendah opini yang diberikan BPK terhadap LKPD. Penerapan sistem pengendalian internal yang baik

mampu menjamin kualitas serta kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan karena tindakan pengendalian internal tersebut akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, pengendalian internal yang layak diperlukan sebagai salah satu metode dalam mencegah terjadinya penipuan dan pelaporan keuangan yang tidak akurat. Kesalahan karena catatan yang tidak akurat atau catatan yang tidak lengkap mengindikasikan bahwa entitas pemerintah tidak menunjukkan gambaran nyata dari status keuangan mereka dan laporan keuangan mungkin memiliki salah saji material (David, 2017).

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel kemandirian daerah yang dimoderasi variabel kinerja menghasilkan nilai sig $0,341 > 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 1,368. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam (**H₆**) **tidak terdukung**. Adanya pembagian kewenangan dalam pengelolaan sumber pendapatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat memaksimalkan potensi sumber keuangan yang ada di daerahnya karena pemerintah daerah hanya memperoleh hak dalam mengelola penerimaan non strategis, sekalipun ditunjang dengan kinerja yang baik. Yang pada akhirnya, kemandirian daerah yang rendah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dan kinerja tidak mampu memoderasi hubungan kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel ketergantungan pada pemerintah pusat yang dimoderasi variabel kinerja menghasilkan nilai sig $0,019 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,314. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh (**H₇**) **terdukung**. Kinerja pemerintah daerah tidak hanya diukur melalui perspektif finansial saja tetapi juga dari perspektif non finansial. Sehingga, ketika aspek finansial, misalnya dana transfer dari pemerintah pusat yang tinggi dan PAD yang rendah, masih terdapat aspek kinerja non finansial yang akan mendukung terciptanya akuntabilitas yang baik misalnya saja kinerja

pegawai yang dihubungkan dengan prestasi kinerja dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, maka akan semakin tinggi kemungkinan daerah tersebut mendapatkan nilai akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini audit yang baik (Fontanella dan Rossietta, 2014).

Hasil pengujian hipotesis untuk variabel politik dinasti yang dimoderasi variabel kinerja menghasilkan nilai sig $0,412 > 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,207. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedelapan (**H₈**) **tidak terdukung**. Penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang terjadi di daerah akibat politik dinasti akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan manipulasi pada laporan keuangan, sehingga laporan keuangan disusun tidak berdasarkan realita yang terjadi. Sehingga BPK tidak akan memberikan opini audit yang baik ketika menemukan adanya kejanggalan pada laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini, kinerja tidak akan berpengaruh terhadap opini yang diberikan BPK ketika laporan keuangan terbukti terjadi manipulasi dan terdapat kejanggalan dalam proses pelaporannya sebagai dampak dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Efektivitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4. Politik dinasti berpengaruh negatif signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5. Jumlah pelanggaran sistem pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
6. Kinerja tidak mampu memoderasi hubungan kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
7. Kinerja mampu memoderasi hubungan ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
8. Kinerja tidak mampu memoderasi hubungan politik dinasti terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang memiliki potensi untuk berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian untuk melihat tren penelitian yang ada dan menggunakan data terbaru agar dapat mengembangkan lebih lanjut penelitian ini.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampel agar informasi yang diperoleh lebih valid dan lebih menggambarkan keadaan seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N. R. dan Riharjo, I. B. (2017). “Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Dengan Pengendalian Intern Sebagai Variabel Pemoderasi”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(6), pp. 1–23.
- Ariansyah, A. et al.,. (2014). “Tingkat Ketergantungan Fiskal dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi”. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1 (3).
- Asako, Y., T. Iida, T. Matsubayashi dan M. Ueda. (2012). “Dynastic Legislators: Theory And Evidence From Japan”, *Working Papers*, Waseda University Organization for Japan-US Studies.
- Brodjonegoro, B., dan Martinez, J. (2002). “An analysis of Indonesia’s transfer system: Recent performance and future prospects”, presented at The Andrew Young School of Policy Studies sponsored conference on “Can Decentralization Help Rebuild Indonesia?”, Georgia State University, Atlanta.
- David, R. (2017). “Contribution of Records Management to Audit Opinions and Accountability in Government”. *South African Journal of Information Management*, 1–15.
- Erryana, V. dan Setyawan, H. (2016). “Determinan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se- Jawa Tengah)”, *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5(1), pp. 1–14.
- Fontanella, A. dan Rossieta, H. (2014). “Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”, *Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok*, pp. 1–65.
- Gujarati, Damodar N. dan Porter, Dawn C. (2012). “Dasar-dasar Ekonometrika”. Bk 1 Ed 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2001). “Auditing: Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan”. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2014). “Politik Lokal: Pola, Aktor dan Alur Dramatikalnya : Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung”. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa.
- Halim, A dan Kusufi, M. S. (2012). “Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah”. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, Jogyanto. (2016). “Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman”. Ed 6. Yogyakarta: BPF E.
- Mahsun, M, Firma. S, dan Heribertus. (2006). “Akuntansi Sektor Publik”. Ed 1. Yogyakarta: BPF E.

- Mardiasmo. 2002. "Akuntansi Sektor Publik". Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- Moisiu, A. (2013) "Decentralization and the Increased Autonomy in Local Governments", *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, pp. 459–463.
- Mudhofar, K. dan Tahar, A. (2016). "Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 17(2), pp. 176–185.
- Nuritomo dan Rossieta, H. (2014). "Politik dinasti, Akuntabilitas, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia", *Simposium Nasional Akuntansi 17*, pp. 1–37.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Pramono, Joko. (2014). "Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah", *Among Makarti*, 7(13), pp. 83-112.
- Prianto, B. (2016). "Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), pp. 105–117.
- Priyatno, Duwi. (2010). "Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab Ujian Pendarasan". Ed 1. Yogyakarta: Gava Media.
- Purbasari, H. dan Bawono, A. D. B. (2017). "Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2), pp. 102–108.
- Querrubin, P. (2010). "Family and Politics: Dynastic Persistence in the Philippines", *Working Paper*, Massachusetts Institute of Technology.
- Raharjo, E. (2007). "Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi", *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1), pp. 37–46.
- Riyadi, Slamet, dan Yulianto. (2014). "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia". *Jurnal Akuntansi*.

